

ABSTRAK

- (A) Nama: Yanzah Bagas Nugraha
- (B) Judul Skripsi: Penyelesaian Sengketa Internal Lembaga Negara (Studi Kasus Pelantikan Pimpinan DPD RI Periode 2017-2019)
- (C) Halaman: vii+78=2018
- (D) Kata Kunci: Sengketa Internal, DPD RI, Mahkamah Konstitusi.
- (E) Isi: Sesuai dengan tuntutan hukum Indonesia untuk meningkatkan rasa keadilan masyarakat daerah, memperluas serta meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam kehidupan nasional, Pemerintah Indonesia membuat sebuah lembaga perwakilan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pembentukan lembaga perwakilan ini dilakukan melalui perubahan ke 3 UUD NRI Tahun 1945. Pada tahun 2017, terjadi sebuah konflik internal di dalam tubuh DPD-RI yang mana melibatkan pimpinan DPD-RI yang baru dengan pimpinan DPD-RI yang lama. Kejadian ini terjadi berawal dari dibuatnya Tata Tertib DPD-RI tentang masa jabatan pimpinan DPD-RI yang awalnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Tata tertib tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa DPD-RI sama seperti lembaga negara MPR dan DPR yang masa jabatan pimpinannya sesuai siklus pemilu yakni 5 tahun. Akan tetapi meskipun Tata tertib DPD-RI tersebut sudah dibatalkan, Mahkamah Agung tetap mengirimkan perwakilannya untuk memandu jalannya sumpah jabatan pimpinan DPD-RI yang baru. Hukum di Indonesia tidak pernah mengatur mengenai konflik internal dalam sebuah lembaga negara, lain halnya apabila konflik antar lembaga negara yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penulisan skripsi ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif. Setelah melakukan penelitian berdasarkan buku-buku dan pendapat dosen fakultas hukum, penulis berpendapat diperlukan suatu terobosan hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini, hal tersebut guna mencegah hal yang sama terjadi pada lembaga negara yang lain.
- (F) Acuan : 25 (1988-2018)
- (G) Pembimbing : Dr. Dwi Andayani B.S, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Yanzah Bagas Nugraha